



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**RENCANA KERJA  
(RENCANA KERJA TAHUNAN)  
BADAN P2SDM TAHUN 2016**







## **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : P. 07/SETBP2SDM/2015  
TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BADAN  
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nomor P.5/SETBP2SDM/2015, serta guna mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2016, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana PJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk-II/2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2016 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2016 ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2015

**KEPALA BADAN,**



**DR. IR. BAMBANG SOEPIJANTO, M.M**  
**NIP. 19561215 198203 1 002**

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **PENGANTAR**

---

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia - Nya, Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ini dapat diwujudkan sebagai tindak lanjut kinerja dan capaian target sesuai arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Harapan dari perwujudan tidak lain ditujukan untuk menjembatani informasi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam mendukung kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode Tahun 2015–2019.*

*Pada kesempatan yang baik ini, Saya selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berpesan agar setiap satuan kerja dalam pelaksanaan percepatan kegiatan disesuaikan dengan skala prioritas dalam rencana operasional yang mendukung capaian kinerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan. Kepada seluruh kepala satuan kerja diharapkan aktif mengawal kinerja organisasi perbendaharaan/DIPA. Mari berkontribusi pada kelancaran jalannya program kerja pembangunan bidang penyuluhan dan pengembangan SDM Tahun 2016.*

*Akhir kata, Selamat bekerja dan maju terus Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat yang lestari dan berkeadilan!!!*

**Jakarta, 3 November 2015**



**Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM**  
**NIP. 19561215 198203 1 002**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1. TANTANGAN PEMBANGUNAN LHK.....	1
2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
4. RUANG LINGKUP.....	3
5. PENGERTIAN.....	3
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP2SDM.....	5
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
2. KEBIJAKAN .....	8
3. SASARAN .....	8
III. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA .....	10
IV. CAPAIAN KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015.....	11
1. ALOKASI ANGGARAN .....	13
2. PROGRESS KEMAJUAN TAHUN BERJALAN .....	15
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN S/D TAHUN BERJALAN DAN PROGNOSIS S/D DESEMBER 2015.....	15
2.2. PERMASALAHAN .....	18
V. RENCANA KERJA TAHUN 2016.....	20
VI. PENUTUP.....	22



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

---

**RENCANA KERJA**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**TAHUN 2016**

---

**I. PENDAHULUAN**

**1. TANTANGAN PEMBANGUNAN LHK**

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kian dinamis dan kompleks baik skala nasional maupun internasional. Isu lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat internasional dari tahun ke tahun terus berkembang secara evolutif sebagai komoditas politik setara dengan isu ekonomi. Dalam berbagai kongres maupun konvensi tingkat dunia, banyak harapan tertuju pada Negara Indonesia, sebagai negara *mega biodiversity*, untuk dapat menjaga kelestarian sumber daya alam termasuk Sumber Daya Hutan sebagai warisan tapak dunia sekaligus paru – paru dunia. Isu lingkungan global seperti perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon, pencemaran, kualitas air, deforestasi dan degradasi lahan, adalah tantangan nyata kekinian sekaligus peluang bagi Indonesia untuk dapat berperan lebih di dunia internasional. Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, harus mampu membuktikan diri kepada dunia dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang tersedia secara lestari dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup maupun kehutanan dalam kerangka pembangunan nasional, juga telah dirumuskan dalam dokumen RPJMN periode Tahun 2010 – 2014, dilanjutkan dengan periode Tahun 2015 – 2019 terintegrasi dengan NAWACITA yang menjadi janji politik Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memainkan tiga peran strategis sekaligus. *Pertama*, menjaga kualitas lingkungan hidup. *Kedua*, menjaga jumlah dan fungsi hutan. *Ketiga*, menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam (SDA) untuk kelangsungan kehidupan.

Inti persoalan pembangunan yang dihadapi oleh berbagai bangsa, termasuk Indonesia, mengerucut pada pokok persoalan bagaimana menjaga keseimbangan antara aktivitas pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam (termasuk ekosistem SDH) dengan daya dukung yang memiliki keterbatasan. Ruang berupa hutan dan lahan serta mutu lingkungan adalah dua batas yang tidak dapat ditawar. Intervensi pada ruang dan sumber daya alam akan mempengaruhi lingkungan.

Dalam keterbatasan ruang, daya dukung fisik dan keseimbangan ekosistem, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tetap harus mampu menterjemahkan skema pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan hutan untuk upaya peningkatan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip keseimbangan tiga pilar ekologi, ekonomi dan sosial/budaya. Hal tersebut telah dimandatkan baik di dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara umum, pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan hutan berujung pada satu tujuan: *untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan baik untuk generasi masa kini & masa depan*. Dalam upaya menjaga keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, salah satu norma pembangunan nasional pada Kabinet Kerja secara tegas menekankan, bahwa “*aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem*”.

## 2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, penyusunan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 ini mengacu pada hasil *kesepakatan trilateral meeting* antara BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015. Substansi materi pada dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 ini juga memperhatikan rumusan hasil perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, Secara sistematis penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016

<b>BAB</b>	<b>Uraian</b>
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>  Uraian BAB memuat Latar Belakang, Sistematika, Maksud dan Tujuan, Serta Ruang lingkup Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016
<b>BAB II</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi BP2SDM</b>  Uraian BAB memuat Tugas dan Fungsi Organisasi; Tujuan Organisasi; Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Program.
<b>BAB III</b>	<b>Program dan Kegiatan Utama</b>

---

	Uraian BAB memuat tentang implementasi kebijakan pembangunan kehutanan bidang penyuluhan dan pengembangan sdm melalui program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan.
<b>BAB IV</b>	<b>Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015</b>
	Uraian BAB memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Sebelumnya dan Capaian Sasaran Strategis Sampai dengan Tahun Berjalan.
<b>BAB V</b>	<b>Rencana Kerja Tahun 2016</b>
	Uraian BAB memuat tentang rencana kerja Badan P2SDM pada Tahun 2016.
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup</b>

---

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan arahan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam jangka waktu satu tahun anggaran (Tahun 2016). Adapun tujuannya adalah sebagai kerangka kerja dan salah satu acuan pengukuran kinerja pada seluruh satuan kerja unit Badan P2SDM sesuai tugas dan fungsi organisasi.

### **4. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dokumen Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 ini mencakup informasi mengenai:

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
- b. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Output, dan Komponen Kegiatan.
- c. Prakiraan alokasi pendanaan program/kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai Pagu Indikatif.
- d. Capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2015

### **5. PENGERTIAN**

Yang dimaksud dengan beberapa istilah dalam Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 ini adalah:

- a. Rencana Kerja adalah dokumen rencana pembangunan Kementerian/Lembaga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk periode satu tahun (Rencana Kerja Tahunan).
- b. Visi adalah gambaran keadaan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah pada akhir periode perencanaan.

- c. Misi adalah gambaran mengenai upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya.
- d. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka satu tahunan sebagai penjabaran dan implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam rangka mencapai sasaran program.
- e. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
- f. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- g. Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian program yang telah ditetapkan.
- h. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
- i. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat agar mampu melaksanakan tugas di bidang kehutanan.
- k. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP2SDM

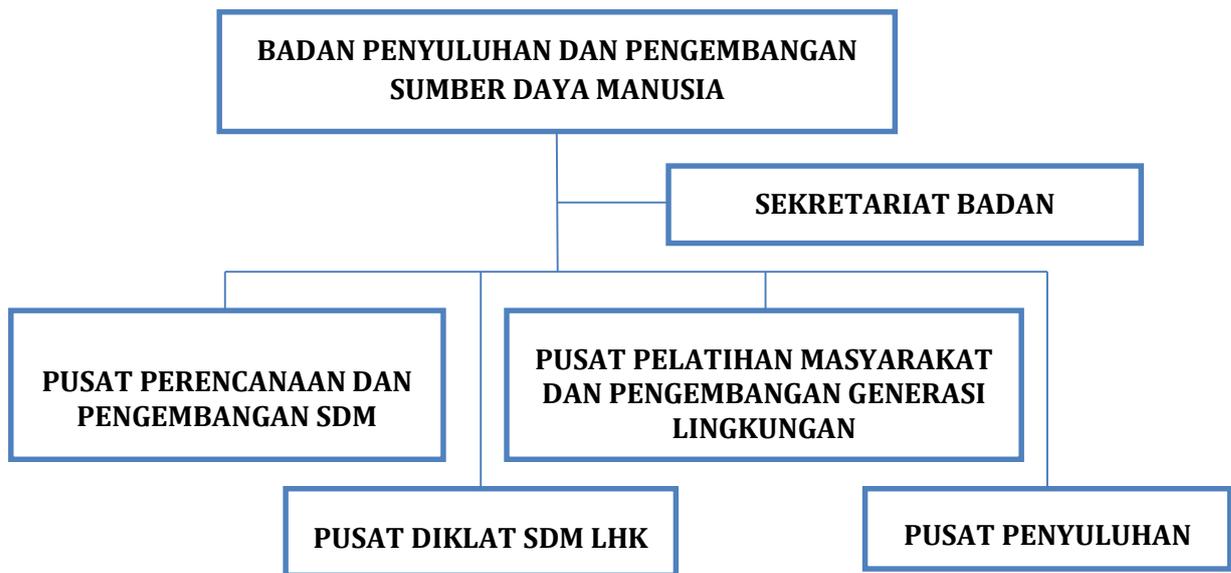
### 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Seiring dengan pembentukan kabinet kerja baru Tahun 2014-2019, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, terjadi penggabungan dua kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, maka organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Perubahan nomenklatur tersebut diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi, serta struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan didukung unit kerja eselon II meliputi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Pusat Penyuluhan dan Sekretariat Badan. Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan P2SDM memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Selain unit kerja eselon II, melalui usulan Surat Kepala Badan Nomor S. 107/IX-SET/2015 tentang usulan UPT Badan P2SDM, Badan P2SDM memiliki 12 unit pelaksana teknis (7 Balai Diklat Kehutanan dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan) yang tersebar di Indonesia seperti pada Tabel 6.

Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
<b>A. Pusat</b>			
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Bogor	
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Serpong	
4.	Pusat Penyuluhan Kehutanan	Jakarta	
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	
<b>B. UPT BDK</b>			
1.	BDK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta; Banten; Lampung; Kalimantan Barat; Bangka Belitung.
2.	BDK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	BDK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	BDK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

5. BDK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
6. BDK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7. BDK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
<b>C. SMK Kehutanan</b>		
1. SMK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2. SMK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3. SMK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4. SMK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5. SMK Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku



Gambar 1. Siswa SMK Kehutanan Negeri

## **2. KEBIJAKAN**

Tujuan pembangunan lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan SDA untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 adalah:

- a. Mendorong dan mensinergikan pengelolaan di tingkat tapak lingkungan dan hutan;
- b. Meningkatkan kapasitas birokrasi, diantaranya penguatan regulasi, penyediaan dan pemanfaatan hasil iptek, dan meletakkan setiap upaya pembangunan kementerian ke dalam konteks pembangunan nasional, serta mendorong budaya kinerja untuk memperbaiki kondisi tapak lingkungan dan hutan;
- c. Meningkatkan modal sosial pembangunan kementerian dan kepercayaan publik serta menggali kemungkinan kerjasama pemerintah dan swasta.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, Badan P2SDM memiliki kewajiban dalam mengawal kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM LHK untuk mendukung keberhasilan pembangunan kementerian tersebut melalui program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

## **3. SASARAN**

Mengacu pada dokumen Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2016 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas air untuk parameter Qmax-Qmin, BOD, COD dan E-Coli di 7 DAS serta kualitas air di 5 Danau;
- b. Meningkatnya sumbangan devisa dan PNBPNP dari seluruh fungsi hutan sebesar 10%;
- c. Meningkatnya kondisi ekosistem yang ditunjukkan dengan semakin tingginya beban pencemaran yang dikelola dan pengelolaan sampah masing-masing sebesar 10% di 380 kab./kota, jumlah hotspot yang semakin turun sebesar 4%, serta semakin tingginya jumlah KPH yang memproduksi sebesar 140 unit (80 KPHP, 40 KPHL dan 20 KPHK).

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kehutanan Tahun 2016 di atas, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan memiliki tugas mengawal dan mengintervensi secara langsung yang terbagi dalam 2 sasaran program yaitu:

Tabel 1. Upaya Pencapaian Sasaran Program tahun 2016

<i>Sasaran Program</i>	<i>Upaya yang dilakukan</i>
<p>1. Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)</p>	<p>Memberikan pendampingan bagi kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dari hutan serta meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari untuk mendukung keberadaan industri kecil dan kreatif berbasis sumberdaya hutan</p>
<p>2. Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)</p>	<p>Mendukung penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam operasionalisasi KPH, peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun non aparatur serta melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan</p>

### III. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Program kerja Badan P2SDM Tahun 2016 adalah program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sasaran penyelenggaraan program tersebut adalah *meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dijabarkan lebih lanjut dalam 5 (lima) butir kegiatan utama dan 1 (satu) butir kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Nomenklatur kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
- e. Peningkatan Penyuluhan;
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Kinerja organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 diukur melalui indikator kinerja sesuai Rencana Strategis Badan P2SDM sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Badan P2SDM Tahun 2016

<i>Sasaran Program</i>	<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Target 2016</i>
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya, 472 unit KTH dan Koperasi.</li> </ul>
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 1.100 orang.</li> <li>• Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 4.680 orang.</li> <li>• Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 4.500 orang, dan 700 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.</li> </ul>

#### IV. CAPAIAN KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015

Target Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja unit organisasi Badan P2SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 dan Target Kinerja Tahun 2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3. Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019

No.	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2015 – 2019	Target Kinerja Tahun 2015
1.	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten	25.400 orang	2.236 orang
2.	Jumlah SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	57.640 orang	9.161 orang
3.	Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan Generasi LHK yang meningkat kapasitasnya	71.200 orang dan 5.000 unit	10.280 orang dan 700 unit
4.	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	5.500 unit KTH	547 unit KTH

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan masing – masing pelaksanaan kegiatan utama maupun kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM Tahun 2015, telah ditetapkan rincian output kegiatan sebagai basis pengalokasian anggaran.

Tabel 4. Target Kinerja Tahun 2015 dan Rincian Output Kegiatan

No.	Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2015	Output Kegiatan TA. 2015
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	2.236 orang	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 1.236 orang b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 1.000 orang
2.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	9.161 orang	a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 7.000 orang b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 45 orang c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 1 unit KHDTK d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 1.236 orang e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan meningkat kapasitasnya, 600 orang
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	280 orang	a. Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 280 orang

4.	Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	10.280 orang dan 700 unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 1.280 orang</li> <li>b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 2.000 orang</li> <li>c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 700 unit sekolah/kampus</li> <li>d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 7.000 orang</li> </ul>
5.	Peningkatan Penyuluhan	547 unit KTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kelas kelompok tani desa – desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 522 unit KTH</li> <li>b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 25 unit</li> <li>c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 33 unit</li> <li>d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan, 600 orang *)</li> </ul>
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM	80 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 80,00 (A) di Tahun 2015</li> </ul>



Gambar 2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lingkup Eselon II

## 1. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi pagu anggaran APBN-P TA. 2015 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 444.447.325.000,-. Sumber dana anggaran tersebut terbagi atas Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 409.827.575.000,- (92,21%) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 34.619.750.000,- (7,79%). Rincian alokasi pagu TA.2015 per jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel 12.

Tabel 5. Rincian Alokasi Pagu TA. 2015 Per Jenis Belanja

(dalam ribuan rupiah)

Pagu	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Opr dan Modal
444.447.325	102.945.053	29.557.653	311.944.619
Persentase (%)	23,16%	6,65%	70,19%

Tabel 6. Distribusi Alokasi Anggaran RM dan PNBP Per Masing - Masing Kegiatan pada Satker Sekretariat Badan dan UPT

(dalam ribuan rupiah)

No.	Kegiatan	Anggaran		
		RM	PNBP	Jumlah
<b>A. Sekretariat Badan</b>				
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	54.009.080	3.100.000	57.109.080
2.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK dan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat	77.275.492	9.050.000	86.325.492
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	1.861.400	-	1.861.400
4.	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	22.443.818	1.301.750	23.745.568
5.	Peningkatan Penyuluhan	26.177.326	3.400.000	29.577.326
6.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya pada Badan	59.792.552	3.268.000	63.060.552
<b>Jumlah A</b>		241.559.668	20.119.750	261.679.418
<b>B. UPT/Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK dan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat</b>				
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor	15.361.357	2.000.000	17.361.357
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten	14.939.655	2.000.000	16.939.655
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar	14.336.070	2.000.000	16.336.070
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru	14.735.785	2.000.000	16.735.785
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda	14.674.743	2.000.000	16.674.743
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar	19.868.609	2.500.000	22.368.609

7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang	15.850.636	2.000.000	17.850.636
<b>C. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>				
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Kadipaten	11.410.110		11.410.110
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Pekanbaru	11.410.108		11.410.108
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Samarinda	11.910.108		11.910.108
4.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Makasar	11.410.108		11.410.108
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Manokwari	12.360.618		12.360.618
<b>Jumlah B dan C</b>		168.267.907	14.500.000	182.767.907
<b>Jumlah A + B + C</b>		409.827.575	34.619.750	444.447.325

Alokasi pagu anggaran BP2SDM Tahun 2015 yang tercantum pada tabel di atas kemudian mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp. 442.459.783.000,-. Perubahan anggaran tersebut karena terdapat anggaran pada satuan kerja yang terlikuidasi sehingga terjadi penambahan pada unit kerja Sekretariat Badan, dan pemotongan pada 2 unit kerja pusat yaitu Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Pusat Diklat Kehutanan.

Tabel 7. Rincian Alokasi Pagu TA. 2015 Per Jenis Belanja (setelah perubahan)

(dalam ribuan rupiah)

Pagu	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Opr dan Modal
442.459.783	102.108.463	29.550.042	310.801.278
Persentase (%)	23,08%	6,68%	70,24%

Tabel 8. Distribusi Alokasi Anggaran RM dan PNBPN Per Masing - Masing Kegiatan pada Satker Sekretariat Badan dan UPT (setelah perubahan)

(dalam ribuan rupiah)

No.	Kegiatan	Anggaran		
		RM	PNBP	Jumlah
<b>A. Sekretariat Badan</b>				
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	53.978.930	3.100.000	57.078.930
2.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK dan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat	76.846.242	9.050.000	85.896.242
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	1.861.400	-	1.861.400
4.	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	20.855.556	1.301.750	22.157.306
5.	Peningkatan Penyuluhan	26.152.936	3.400.000	29.552.936
6.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM	59.877.062	3.268.000	63.145.062

<b>Jumlah A</b>		239.572.126	20.119.750	259.691.876
<b>B. UPT/Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK dan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat</b>				
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor	15.361.357	2.000.000	17.361.357
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten	14.939.655	2.000.000	16.939.655
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar	14.336.070	2.000.000	16.336.070
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru	14.735.785	2.000.000	16.735.785
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda	14.674.743	2.000.000	16.674.743
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar	19.868.609	2.500.000	22.368.609
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang	15.850.636	2.000.000	17.850.636
<b>C. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>				
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Kadipaten	11.410.110		11.410.110
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Pekanbaru	11.410.108		11.410.108
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Samarinda	11.910.108		11.910.108
4.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Makasar	11.410.108		11.410.108
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Manokwari	12.360.618		12.360.618
<b>Jumlah B dan C</b>		168.267.907	14.500.000	182.767.907
<b>Jumlah A + B + C</b>		407.840.033	34.619.750	442.459.783

## 2. PROGRESS KEMAJUAN TAHUN BERJALAN

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN S/D TAHUN BERJALAN DAN PROGNOSIS S/D DESEMBER 2015

Realisasi anggaran pada Badan P2SDM hingga 31 Oktober 2015 telah terserap sebesar Rp. 193.414.150.016,- (43,68% pagu anggaran Badan P2SDM). Prognosis realisasi anggaran Badan P2SDM hingga akhir Desember 2015 adalah Rp. 420.964.609.434,- (95,07%). Capaian pelaksanaan kinerja per satuan kerja lingkup Badan P2SDM s.d 21 September 2015 dan prognosis realisasi s.d Desember 2015 seperti tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian pelaksanaan kinerja s.d 31 Oktober 2015 dan prognosis realisasi hingga Desember 2015

No.	Satuan Kerja	Pagu	s.d 31 Oktober 2015		Prognosis Desember 2015	
			Realisasi	%	Target Realisasi	%
<b>A. UNIT KERJA PUSAT</b>						
1	Sekretariat Badan	63.145.062.000	24.798.398.097	48,47%	60.619.260.520	96,00%
2	Pusrenbang	57.078.930.000	31.899.835.658	64,54%	54.795.772.800	96,00%
3	Pusdik LHK	87.757.642.000	26.863.257.552	34,31%	84.247.336.320	96,00%
4	Puslatmas GL	22.157.306.000	5.475.710.304	24,49%	21.049.440.700	95,00%
5	Pusluh	29.552.936.000	11.071.811.571	45,16%	25.119.995.600	85,00%
<b>B. BALAI DIKLAT KEHUTANAN</b>						
6	BDK Pematang Siantar	16.336.070.000	12.248.477.904	72,93%	15.845.987.900	97,00%
7	BDK Pekanbaru	16.735.785.000	13.092.945.830	76,14%	16.233.711.450	97,00%
8	BDK Bogor	17.361.357.000	11.375.694.422	63,84%	16.493.289.150	95,00%
9	BDK Kadipaten	16.939.655.000	11.397.122.920	66,47%	16.092.672.250	95,00%
10	BDK Makasar	22.368.609.000	13.762.494.859	60,23%	21.250.178.550	95,00%
11	BDK Samarinda	16.674.743.000	13.285.971.779	77,60%	15.841.005.850	95,00%
12	BDK Kupang	17.850.636.000	12.646.276.449	68,96%	16.958.104.200	95,00%
<b>C. SMK KEHUTANAN NEGERI</b>						
13	SMK Pekanbaru	11.410.108.000	8.860.680.117	74,01%	11.067.804.760	97,00%
14	SMK Kadipaten	11.410.110.000	8.028.756.942	67,06%	10.839.604.500	95,00%
15	SMK Samarinda	12.246.483.000	9.854.440.873	77,10%	11.314.602.600	92,39%
16	SMK Makasar	11.410.108.000	9.858.440.873	60,26%	10.839.602.600	95,00%
17	SMK Manokwari	12.360.618.000	7.103.214.782	52,10%	11.989.799.460	97,00%
<b>JUMLAH A + B + C</b>		<b>442.796.158.000</b>	<b>256.585.319.801</b>	<b>57,95%</b>	<b>420.964.609.434</b>	<b>95,07%</b>

Tabel . Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Rincian Output Kegiatan s/d 31 Oktober 2015

No.	IKP TAHUN 2015-2019	TARGET KINERJA 2015	PROGRESS CAPAIAN s/d 31 Oktober 2015
1.	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	2.236 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakti Rimbawan 822 orang</li> <li>• Basarhut 99 orang</li> <li>• SMK 224 orang</li> <li>• 850 PK kompeten</li> <li>• Magang bakti rimbawan 91 orang</li> </ul> <p><b>Total 2.086 orang</b></p>

2. Jumlah SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 57.640 orang.	9.161 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah diklat SDM aparatur 6,897 orang, disamping itu terdapat diklat kerjasama di Pusdiklat dan 7 BDK sebanyak 2.638 orang.</li> <li>• Lulusan SMK Kehutanan sebanyak 281 orang</li> <li>• S2 dan S3 yang lulus sebanyak 117 orang (S2 sebanyak 103 orang dan S3 sebanyak 14 orang)</li> </ul>
3. Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan Generasi LHK yang meningkat kapasitasnya, 96.200 orang dan 5.000 sekolah/kampus.	10.116 orang dan 700 sekolah/kampus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelatihan SDM non aparatur dan generasi lingkungan 3,925 Orang</li> <li>• 95 sekolah adiwiyata mandiri dan 500 sedang verifikasi lapangan untuk adiwiyata nasional</li> </ul>
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH	522 kelas KTH 25 Koperasi KTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progres dalam tahap I pembayaran 40 % peningkatan Kelas KTH pada 125 KTH di 7 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, banten, DIY, Bali, Sulawesi Selatan)</li> <li>• 25 Koperasi berstatus akta notaris</li> </ul>



Gambar 3. Rapat Koordinasi Kerjasama Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah

## 2.2. PERMASALAHAN

Sebagai unit kerja *supporting system* dalam nilai kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan P2SDM menjadi penentu berhasil tidaknya program kerja teknis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di lapangan. Berbagai program kerja teknis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dirancang sedemikian rupa dalam dokumen perencanaan, tidak akan berdaya dan berhasil guna tanpa didukung kualitas SDM yang handal dalam mengawal pelaksanaan program kerja tersebut.

Berbagai upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, telah menunjukkan banyak kemajuan dengan berbagai langkah terobosan. Tidak hanya terfokus pada upaya mengisi kesenjangan kompetensi pada SDM Aparatur, fokus perhatian yang sama penting juga diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas SDM Non Aparatur, utamanya para pelaku utama pembangunan. Beberapa permasalahan umum yang masih dihadapi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan alokasi pembiayaan program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM masih belum memadai. Alokasi anggaran Badan P2SDM Tahun 2015 masih dibawah 10% dari total anggaran kementerian.
- b. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia, belum sepenuhnya sesuai dengan standar jabatan dan kompetensinya.
- c. Jumlah dan/atau kualitas tenaga fungsional (widyaiswara, guru, penyuluh) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan standar kompetensi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kediklatan, pendidikan menengah kejuruan kehutanan, serta penyuluhan skala nasional. Dalam penyelenggaraan uji kompetensi SDM, masih belum didukung oleh ketersediaan tenaga asesor.
- d. Peraturan perundangan bidang penyuluhan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
- e. Belum optimalnya pengelolaan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan pengelolaan hutan lestari.
- f. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi strategis bidang penyuluhan dan pengembangan SDM.
- g. Pelaksanaan DIPA APBN pada triwulan pertama hanya untuk kegiatan gaji dan operasional perkantoran, sehingga realisasi penyerapan baru mencapai 11,03%.
- h. Setelah DIPA APBN-P terbit (penggabungan BA.029 - Kementerian Kehutanan dan BA.043 - Kementerian Lingkungan Hidup), pada Bulan Mei Minggu II-III, terjadi pagu minus pada BA 043, di lingkup BP2SDM sebesar Rp. 1,9 milyar sehingga usulan permintaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) di KPPN agak terhambat. Namun pada minggu ke-IV, UP sebesar Rp. 1,7 milyar untuk lima satuan kerja telah disetujui oleh KPPN dan pada bulan berikutnya TUP sebesar Rp. 5,2 milyar terbit.
- i. Penyerapan anggaran PNBPN Badan P2SDM s.d. AGUSTUS 2015 masih sangat rendah yaitu sebesar Rp. 3,072,491,983 atau 8.87% dari pagu PNBPN Badan P2SDM. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang bersumber dana PNBPN sengaja di jadwalkan pelaksanaannya di

Triwulan ke III dan ke IV serta terdapat beberapa kegiatan PNBPN yang pelaksanaannya masih menunggu DIPA revisi.

- j. Sebagian besar proses pengadaan barang/jasa di UPT Balai Diklat Kehutanan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri terkendala pada proses pencairan tanda bintang dan revisi, serta gagal lelang oleh pelaksana ULP di daerah masing-masing.
- k. Pada Satker Sekretariat BP2SDM terdapat pagu untuk membayar tunjangan kinerja pegawai lingkup Badan P2SDM yang belum dapat dibayarkan dari Juli-Agustus 2015 sebesar 5,4 M yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran.
- l. Dokumen administrasi LS pada pekerjaan penunjukan langsung yang pelaksanaan fisiknya telah dilaksanakan masih belum selesai diproses.

### **2.2.1. UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara setiap satker membagi habis kegiatan sesuai skala prioritas dalam rencana operasional dan melakukan perubahan revisi yang mendukung capaian kinerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan.
- b. Setiap Kepala satker aktif mengawal kinerja organisasi perbendaharaan/dipa.
- c. Setiap pertanggungjawaban anggaran harus mengacu pada prinsip-prinsip "Patuha" (kepatuhan, kehati-hatian dan keadilan), *Rechtmategheid*, *Wetmategheid*, *Doelmategheid*, dan *Logis*.
- d. Melakukan optimalisasi pada pengelolaan KHDTK.
- e. Melakukan optimalisasi pengelolaan data dan informasi strategis pada lingkup Badan P2SDM.
- f. Melakukan uji kompetensi pada SDM yang ada, sehingga jumlah dan kualitas setiap SDM sesuai dengan kompetensi di bidang dan jabatan masing-masing.
- g. Percepatan penyerapan PNP pada lingkup Badan P2SDM.
- h. Proses tanda bintang segera diselesaikan di kementerian keuangan, mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan tinggal 80 hari kerja, proses gagal lelang yang diadakan oleh panitia lelang BDK dan SMK agar segera diproses lelang ulang, sedangkan lelang yang diadakan oleh ULP daerah agar segera berkoordinasi untuk proses lelang ulang.
- i. Badan P2SDM agar segera menyempurnakan anjab (analisa jabatan) dan evjab (evaluasi jabatan) sesuai dengan kelengkapan dokumen untuk penerbitan Perpres kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 70%.
- j. Pimpinan unit kerja mendorong pejabat pengadaan untuk memproses dokumen yang terkait dengan LS pekerjaan penunjukan langsung.

## V. RENCANA KERJA TAHUN 2016

Nama Unit Organisasi	: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kode Program	: 029.08.10
Nama Program	: Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Sasaran Program	: Meningkatnya daya saing SDM LHK

Alokasi pagu anggaran RAPBN TA. 2016 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 360.838.691.000,-. Sumber dana anggaran tersebut terbagi atas Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 315.838.691.000,- (87,53%) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 45.000.000.000,- (12,47%). Rincian alokasi pagu TA.2016 per jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Pagu anggaran Tahun 2016 (ribuan rupiah)

PAGU ANGGARAN	RM	PNBP
360.838.691	315.838.691	45.000.000
Persentase (%)	87,53%	12,47%

Tabel 11. Rincian alokasi pagu TA. 2016 per jenis belanja

(dalam ribuan rupiah)

Pagu	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional dan Modal
360.838.691	102.945.053	29.554.947	228.338.691
Persentase (%)	28,53%	8,19%	63,28%

Tabel 12. Distribusi alokasi anggaran 2016 per Satuan Kerja Badan P2SDM

(dalam ribuan rupiah)

No	Kegiatan	Jumlah
<b>A. Sekretariat Badan</b>		
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	66.628.000
2.	Penyelenggaraan Diklat SDM LHK	45.702.000
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	3.300.000
4.	Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	18.428.000
5.	Peningkatan Penyuluhan	20.699.000
6.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada BP2SDM	31.065.000

No	Kegiatan	Jumlah
<b>B. UPT/Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK dan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat</b>		
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor	16.853.000
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten	14.474.000
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematang Siantar	12.963.000
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru	13.765.000
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda	13.439.000
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar	17.406.000
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang	15.263.000
<b>C. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>		
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Kadipaten	14.110.000
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Pekanbaru	14.149.000
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Samarinda	15.609.000
4.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Makasar	13.908.000
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Di Manokwari	16.377.691
<b>Jumlah A + B + C</b>		<b>360.838.691</b>

Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan P2SDM yang kemudian terangkum dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Program. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan indikator kinerja disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Target IKP Badan P2SDM Tahun 2016

Target IKP	Tahun
	2016
1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	1.100 org
2. Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang.	4.680 org
3. Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.	4.500 org 700 unit
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	472 unit

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan P2SDM memiliki target setiap tahunnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan LHK. Perkiraan capaian target indikator kinerja Tahun 2016 tersebut tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator kinerja dan Prakiraan Capaian Target Tahun 2016 Sesuai Renstra Badan P2SDM

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
(1)	(2)	(3)
5440	<p>Perencanaan Pengembangan SDM</p> <p>Sasaran: Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten</p>	<p>a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 600 orang</p> <p>b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang</p>
5441	<p>Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK</p>	<p>a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 2.890 orang</p> <p>b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 40 orang</p> <p>c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK</p> <p>d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 600 orang</p> <p>e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 450 orang</p>
5442	<p>Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</p> <p>Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</p>	<p>Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 700 orang</p>
5443	<p>Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan</p>	<p>a. Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya, 500 orang</p> <p>b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 1.000 orang</p> <p>c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata) 700 unit sekolah/kampus</p> <p>d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 3.000 orang</p>
5444	<p>Peningkatan Penyuluhan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</p>	<p>a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 450 KTH</p> <p>b. Jumlah koperasi KTH yang dibentuk, 22 unit</p> <p>c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit</p> <p>d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 450 orang</p>

5439	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.</i>
	<p>Sasaran:  <i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i></p>	

## **VI. PENUTUP**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam mengemban tugas pelayanan pembangunan dan pemerintahan harus terus bertumbuh dan berkembang menjadi institusi yang berkinerja produktif dan profesional, melahirkan berbagai 'sejarah' peningkatan dan pengembangan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Bersih, Kompeten, dan Melayani guna mendukung kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai langkah pembaruan kebijakan pembangunan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terus dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Peningkatan kualitas dan pengembangan SDM harus terus diarahkan guna mengisi kesenjangan kompetensi SDM dan pengembangan kapasitas pelaku utama pembangunan sehingga berbagai program kerja pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Upaya peningkatan kapasitas SDM kehutanan agar mengarah sesuai kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pembangunan kehutanan, juga harus terintegrasi dan selaras dengan program kerja teknis yang dikembangkan. Untuk itu, tugas untuk meningkatkan kualitas SDM tidak semata – mata berada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, tetapi melekat pada seluruh elemen penyelenggara pembangunan kehutanan baik di setiap tingkatan pemerintahan pusat maupun daerah, swasta/termasuk lembaga swadaya masyarakat.

**a. Kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM (K1)**

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran)
<b>Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK1)</b>				<b>Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM (66,63 Milyar)</b>
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK aparatur	a. Pemetaan SDM aparatur LHK	Prov	34	
	b. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur Kehutanan di KPH	Dok	1	
	c. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya	Dok	1	
	d. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya	Lap	1	
<b>Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK2)</b>				
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK non aparatur	a. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang dikelola	Org	1.777	
	b. Pemetaan SDM Non Aparatur LHK	Prov	34	
	c. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan di KPH	Dok	1	
	d. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya	Dok	1	
	e. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya	Lap	1	
<b>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK3)</b>				
Meningkatnya SDM LHK yang kompeten	a. Jumlah SDM LHK pendukung KPH yang diuji kompetensi /sertifikasi	Org	500	
	b. Dokumen standar kompetensi SDM LHK	Dok	4	

**b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)**

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran)
<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)</b>				<b>Pusat Diklat SDM LHK (45,70 Milyar)</b>  <b>Balai Diklat Kehutanan (100,86 Milyar)</b>
Tersedianya rencana pengembangan diklat dan pembelajaran e-learning	a. Jumlah draft peraturan Kediklatan	Ranc Peraturan	3	
	b. Jumlah Kurikulum dan Silabus	Dok	20	
	c. Laporan pelaksanaan pembelajaran e-learning	Lap	1	
	d. Pengelolaan KHDTK	Unit	2	
<b>Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)</b>				
Terselenggaranya Diklat Teknis bagi SDM LHK	a. Jumlah Diklat Teknis	Org	1.832	
	b. Jumlah Diklat fungsional	Org	265	
	c. Jumlah karyawan program S2 dalam negeri	Org	35	
	d. Jumlah karyawan program S3 dalam negeri	Org	5	
	e. Laporan Pengelolaan pendidikan lanjutan	Lap	1	
	f. Jumlah tenaga Bakti Rimawan yang meningkatkan kapasitasnya	Org	600	
	g. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya	Org	450	
<b>Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)</b>				
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan administrasi bagi SDM LHK	a. Jumlah Diklat prajabatan	Org	453	
	c. Jumlah Diklat administrasi	Org	260	
	b. Jumlah Diklat kepemimpinan	Org	80	
<b>Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)</b>				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran	a. Dokumen Rencana dan Program	Dok	3	
	b. Dokumen Kepegawaian	Dok	1	
	c. Dokumen administrasi dan pengelolaan BMN	Dok	2	

**c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)**

<b>Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan</b>	<b>Indikator Unit Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Penanggung Jawab (Anggaran)</b>
<b>Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (UK)</b>				<b>SMKKN (77,45 Milyar)</b>
Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan untuk mendukung KPH	a. Jumlah pendidikan siswa SMK Kehutanan	Org	719	
	b. Laporan Pelaksanaan system manajemen mutu : ISO 9002 - 2008	Lap	1	
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan	Dok	1	
	d. Laporan pelaksanaan publikasi pendidikan	Lap	1	
	e. Laporan kerjasama pendidikan	Lap	1	

**d. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)**

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran)
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)</b>				<b>Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (18,43 Milyar)</b>
Terselenggaranya pelatihan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kader lingkungan hidup	a. Jumlah generasi muda LH yang meningkat kapasitasnya	Org	1.000	
	b. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas generasi Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan	Draft	4	
<b>Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan (UK2)</b>				
Terselenggaranya ekspos generasi lingkungan	a. Jumlah kader LH yang dilatih/dibentuk dan dibina	Org	1.280	
	b. Jumlah ekspos/pameran generasi lingkungan hidup	Org	2.000	
	c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas kader Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan	Draft Peraturan	6	
<b>Pengembangan Generasi Lingkungan (UK3)</b>				
Terwujudnya sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	a. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	Unit	700	
	b. Jumlah anggota Pramuka Penegak dan Pandega dan/atau anggota Saka Kalpataru yang meningkat kapasitasnya	Org	3.000	
	c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang program sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang disusun atau dikembangkan	Draft	6	
	d. Laporan pembinaan program adiwiyata	Lap	4	
	e. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang Saka Kalpataru yang disusun atau dikembangkan	Draft	5	
<b>Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)</b>				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran	a. Dokumen Rencana dan Program	Dok	3	
	b. Dokumen Kepegawaian	Dok	1	
	c. Dokumen administrasi, pelaporan dan pengelolaan BMN	Dok	4	

e. Kegiatan Peningkatan Penyuluhan (K5)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran)
<b>Pengembangan Penyuluhan (UK1)</b>				<b>Pusat Penyuluhan (20,70 Milyar)</b>
Tersedianya perangkat pengembangan penyuluhan kehutanan	a. Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK	Dok	6	
	b. Pengembangan Metoda Penyuluhan	Dok	4	
	c. Pengembangan Materi Penyuluhan	Dok	14	
	d. Dokumen administrasi, pelaporan dan pengelolaan BMN	Dok	4	
<b>Ketenagaan Penyuluhan (UK2)</b>				
Meningkatnya kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur	a. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH	Org	450	
	b. Fasilitasi pembinaan penyuluhan aparatur	Org	300	
	c. Fasilitasi pembinaan penyuluhan non aparatur	Org	150	
<b>Kelembagaan Penyuluhan (UK3)</b>				
Pemantapan ke lembaga penyuluh	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	Unit	450	
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang terbentuk	Unit	22	
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	Unit	15	

**f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)**

<b>Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan</b>	<b>Indikator Unit Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Penanggung Jawab (Anggaran)</b>
<b>Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama (UK1)</b>				<b>Sekretariat BP2SDM (31,06 Milyar)</b>
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan kerjasama	a. Pembinaan administrasi dan teknis perencanaan/program	Lap	8	
	b. Pembinaan administrasi dan teknis revisi anggaran	Lap	6	
	c. Pengembangan kerjasama teknis penyuluhan dan pengembangan SDM	Lap	6	
<b>Koordinasi Tata kelola Keuangan dan Umum (UK2)</b>				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan	a. Pembinaan administrasi umum	Lap	5	
	b. Pembinaan administrasi keuangan	Lap	16	
	c. Pembinaan administrasi perlengkapan	Lap	4	
<b>Koordinasi Tata Kelola informasi, publikasi dan evaluasi (UK3)</b>				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi Penyusunan informasi, publikasi dan evaluasi	a. Pengembangan informasi	Lap	5	
	b. Pengembangan dokumentasi dan publikasi	Lap	5	
	c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lap	20	
<b>Koordinasi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana (UK4)</b>				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana	a. Pembinaan administrasi kepegawaian	Lap	5	
	b. Pembinaan jabatan fungsional	Lap	5	
	c. NSPK peraturan perundangan P2SDM	Draft peraturan	10	
<b>Layanan Perkantoran</b>		<b>Bulan</b>	<b>12</b>	
<b>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		<b>Unit</b>	<b>10</b>	
<b>Gedung/Bangunan</b>		<b>M2</b>	<b>60</b>	